

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi.....	iii
Abstrak	vi
Daftar Singkatan	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual	12
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian	16
3. Jenis Data	17
4. Teknik Pengumpulan Data	18
5. Teknik Analisis Data.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II : KERANGKA TEORITIS	21
A. Teori Negara Hukum	21
B. Teori Lembaga Negara	24
C. Teori <i>Separation of Power</i>	28
D. Teori Independensi	31
BAB III : DATA HASIL PENELITIAN	35
A. Data Putusan Mahkamah Konstitusi	35

1. Pihak.....	35
2. Duduk Perkara.....	35
3. Petitum	38
4. Proses Persidangan.....	39
5. Pertimbangan Hakim.....	41
6. Hasil Putusan.....	42
7. Pendapat Berbeda (<i>Dissenting Opinion</i>).....	43
B. Data Perundang-Undangan	50
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	50
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	53
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	55
C. Data Hasil Wawancara	58
BAB IV : ANALISIS PERMASALAHAN	73
A. Kedudukan Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 Ditinjau Dari Struktur Kelembagaan Negara	73
B. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara.....	87

BAB V : PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN